

PROSPEK PENGEMBANGAN SYARA' DALAM PROSES ALIH PERAN KB MANDIRI DI SULAWESI SELATAN

Oleh : Pat. Badrun x)

I

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa peranan dan tanggungjawab dalam gerakan Keluarga Berencana, baik perorangan maupun masyarakat, perlu semakin Jidorong dan diperkuat dengan makin melibatkan organisasi dan pemuka masyarakat serta pihak-pihak swasta, sehingga pengelolaan dan pelaksanaan keluarga berencana dapat makin memasyarakatkan dan berlangsung secara mandiri.^o

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga resmi pengelola gerakan Keluarga Berencana (KB) selama ini untuk merangsang kegairahan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gerakan KB; antara lain dengan mendorong dan memberikan peran yang lebih nyata pada potensi yang ada dalam masyarakat sesuai dengan bidangnya serta memberikan dukungan dan pengayoman kepada institusi masyarakat untuk dapat menjadi wadahkegiatar masyarakatnya sendiri melalui berbagai upaya yang mengarah kepada mandiri.

Khusus di Sulawesi Selatan, berbagai kegiatan yang dianggap sebagai "terobosan" telah dilakukan oleh pihak BKKBN di daerah ini; antara lain kegiatan peningkatan peran serta wanita, pemuda/remaja, mengadakan temu wicara dengan unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan KB, memanfaatkan

lembaga tradisional Amma Towa dan Tudang Sipulung dalam rangka memasyarakatkan KB, memberikan discount-card kepada peserta KB lestari tertentu untuk digunakan dalam berbagai pelayanan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain, baik terpadu maupun sektoral. Hasil kegiatan-kegiatan tersebut cukup berarti dalam meningkatkan persentase pencapaian target peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif.²⁾

Namun demikian, di balik keberhasilan yang dicapai itu, terdapat pula perkembangan yang kurang menggembirakan yang diidentifikasi sebagai permasalahan gerakan KB di Sulawesi Selatan, setidaknya sampai pada penghujung tahun 1990.

Permasalahan yang dimaksud meliputi antara lain, rendahnya proporsi pemakaian kontrasepsi efektif terpilih (MKET) dibandingkan dengan kontrasepsi lain, terjadinya drop out yang cukup tinggi, proporsi PUS yang berusia di bawah 35 tahun jauh lebih rendah kesertaannya ber KB daripada PUS yang berusia 35 tahun ke atas. Mutu pelayanan lapangan juga diakui masih memiliki kelemahan yang antara lain diindikasikan oleh masih seringnya terjadi efek samping dan komplikasi pasca pelayanan.

Lini lapangan juga diakui masih memperlihatkan kelemahan yang berarti terutama pada tingkat kecamatan ke bawah, institusi-institusi masyarakat yang cukup

potensial belum difungsikan dengan baik.³⁾

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi gerakan KB di Sulawesi Selatan selama ini, ada yang disebabkan oleh keterbatasan faktor intern dan ada pula yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam masyarakat dan selama ini belum dapat ditanggulangi secara memadai melalui sistem dan mekanisme yang diterapkan.

Sejalan dengan kebijaksanaan dan program penelitian dan pengembangan BKKBN pada Pelita V yang antara lain menekankan prioritas kegiatan pada bidang dinamika partisipasi masyarakat⁴⁾ maka upaya penelusuran faktor-faktor kendala yang ada dalam masyarakat perlu pula diberi penekanan prioritas.

Sesuai dengan informasi yang diungkapkan parapeneliti selama ini bahwa faktor-faktor kendala utama dalam masyarakat yang dirasakan masih cukup dominan ialah "pemahaman" masyarakat terhadap nilai budaya dan agama/kepercayaan yang dianut dalam kaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi tertentu.⁵⁾ Karena itu perlu diupayakan terus untuk menemukan cara-cara yang dapat dipandang mampu menerobos kendala primordial dalam masyarakat, yakni persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan ajaran agama (jadi bukan hukum agama). Salah satu upaya yang diduga akan mampu memenuhi keperluan itu ialah memanfaatkan pranata sosial keagamaan yang secara tradisional tumbuh dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya syara' di kalangan masyarakat (umat) Islam di Sulawesi Selatan.

Syara' adalah salah satu institusi keaga-

maan khas umat Islam Sulawesi Selatan. Aparat-aparat syara' paling sering dan paling akrab berhubungan dengan masyarakat untuk melayani kepentingan mereka, baik menyangkut urusan ibadah maupun urusan sosial keagamaan.⁶⁾

Tampaknya selama ini, syara' belum tersentuh secara nyata oleh kebijaksanaan operasional KB di daerah ini, khusus dalam rangka pemantapan lini lapangan. Pejabat-pejabat agama yang sering mendapat undangan mengikuti penataran, bimbingan, penataran KB atau dimanfaatkan langsung dalam kegiatan penyuluhan Kr* adalah aparat formal dari instansi Departemen Agama yang pada umumnya bukan aparat syara'.

Kondisi sosial keagamaan umat Islam Sulawesi Selatan yang secara umum cenderung mengakomodasi pola tradisi masyarakat⁷⁾, memberi peluang bagi syara' untuk tetap berfungsi dalam masyarakat. Diduga bahwa apabila syara' dapat dimanfaatkan secara nyata, dalam pengertian bahwa para aparatnya dilibatkan langsung di dalam kegiatan KB sesuai bidangnya, akan sangat membantu kesuksesan pelaksanaan gerakan KB di daerah ini. Masalahnya ialah sejauhmana kemungkinan dan harapan pemanfaatan syara' dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan gerakan KB di daerah ini dapat direalisasikan?

Untuk memperoleh informasi yang meyakinkan mengenai kemungkinan itu, perlu dilakukan penelitian yang seksama. Sehubungan dengan itu maka penulis mencoba mengajukan proposal penelitian ke BKKBN Pusat melalui BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan dengan judul: PROSPEK

PENGEMBANGAN SYARA' DALAM PROSES ALIH PERAN KB MANDIRI DI SULAWESI SELATAN.

Setelah melalui proses penyeleksian yang cukup ketat, pada akhirnya BKKBN Pusat menerima proposal tersebut dengan realisasi Surat Pengunjukan Langsung (SPL) dari Deputi Bidang Pengembangan Program BKKBN Nomor 2913/PD.101/F3/90 tanggal 13 Juni 1990 kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan pemanfaatan syara' untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan gerakan KB, termasuk KB Mandiri, di daerah Sulawesi Selatan. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi dua tujuan khususnya: (1) memperoleh informasi yang faktual dan akurat tentang eksistensi syara' selaku institusi keagamaan khas umat Islam Sulawesi Selatan dalam tingkat perkembangan dewasa ini, dan (2) memperoleh informasi yang faktual dan akurat tentang kemungkinan pengembangan fungsi dan peranan syara' agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang kesuksesan pelaksanaan gerakan KB, termasuk KB Mandiri, di daerah Sulawesi Selatan.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut di atas, penelitian dirancang sebagai studi kasus, dan diadakan untuk menghimpun data dan informasi tentang dua aspek pokok mengenai syara', yakni: (1) Eksistensinya sebagai suatu institusi, meliputi riwayat kehadirannya, struktur organisasi dan kedudukan serta fungsi dan perannya, mekanisme kerja, kepemimpinan dan sistem penggantian pimpinan, dan vitalitasnya dalam konteks pergantian masa dan per-

ubahan sosial, (2) Prospek pemanfaatan syara' dalam gerakan KB meliputi kemampuan fungsi dan peranan syara' dewasa ini, pengetahuan, sikap, dan pengalaman aparat syara' dalam gerakan KB.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive dalam wilayah komunitas Bugis, Makassar, dan Mandar, di mana setiap wilayah komunitas diwakili oleh sebuah kabupaten yang terendah persentase pencapaian peserta KB aktif (CU) untuk pemakaian Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih (MKET) per pasangan usia subur (PUS) menurut data akhir tahun 1989. Berdasarkan kriteria itu maka terpilihlah tiga daerah kabupaten sebagai lokasi penelitian, yakni: (1) Kabupaten Soppeng untuk komunitas Bugis, (2) Kabupaten Gowa untuk komunitas Makassar, dan (3) Kabupaten Majene untuk komunitas Mandar.⁸⁾

Responden penelitian ialah para aparat syara' yang menjabat imam desa/kelurahan atau imam kampung/dusun yang pemilihannya dilakukan secara selektif kualitas.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik wawancara mendalam, focused group discussion, dan observasi.

Peneliti lapangan dilengkapi dengan peralatan berupa pedoman pertanyaan yang bentuknya menyerupai kuesioner dan peralatan perekaman suara (tape recorder mini). Teknik lain yang digunakan menghimpun data ialah studi pustaka dan dokumentasi.

Wawancara mendalam juga dilakukan dengan pejabat-pejabat formal terkait (dari unsur Pcmda, DEPAG, BKKBN setempat), dengan ulama/tokoh Islam dalam setiap komunitas, tokoh adat yang terkait dan lain-lain yang dipandang perlu.⁹⁾

Data yang terkumpul, setelah diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dilakukan perluasan (elaborasi) seperlunya. Hasil analisis diberi interpretasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta dikaitkan dengan temuan lain serta teori-teori yang relevan.¹⁰⁾

Eksistensi Syara'

Kelahiran syara' sebagai institusi sosial keagamaan khas umat Islam Sulawesi Selatan adalah konsekuensi logis dari penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan-kerajaan di daerah ini.

Agama Islam diterima secara resmi oleh kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke 17 Masehi, dimulai di kerajaan Luwu (1603), kemudian kerajaan Gowa (1605), disusul berturut-turut oleh kerajaan kerajaan Sidenreng (1608/1609), Wajo 1610), Bone (1611) dan Balanipa di daerah Mandar (1615). Para tahun 1620 dapat dikatakan bahwa seluruh kerajaan di daerah Bugis, Makassar, dan Mandar telah menerima Islam, dan sampai tahun 1630 seluruh daerah Sulawesi Selatan, kecuali Tana Toraja dan Mamasa, telah memeluk Islam.¹¹⁾

Pembentukan syara' tidak dimaksudkan sebagai satu institusi yang berdiri sendiri melainkan kehadirannya melengkapi unsur-unsur pangngadereng, yakni pranata pranata kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. Dengan kehadiran syara' maka unsur-unsur pangngadereng yang semula hanya empat kemudian menjadi lima yakni: *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, dan *sara'* (*syara'*).¹²⁾

Melalui institusi syara' yang secara konvensional selalu dipimpin oleh anggota keluarga raja atau bangsawan atau tokoh adat atau tokoh terpandang dalam masyarakat setempat, hukum Islam secara berangsur diintegrasikan kedalam sistem pangngadereng hingga pada akhirnya Islam mewarnai pangngadereng secara keseluruhan. Sejak itulah syara' diidentikkan masyarakat sebagai pangngadereng itu sendiri.

Struktur organisasi syara' mengikuti susunan organisasi *ade'* (organisasi pemerintahan kerajaan). Pada tingkat pusat kerajaan terdapat seorang *kadhi* selaku pejabat tertinggi syara', pada tingkat kerajaan kecil (*setingkatkecamatan* atau *distrik*) terdapat pejabat syara' dengan nama jabatan yang berbeda-beda antara beberapa daerah; ada yang menamakan dengan *imanglimpo* (*iman kerajaan kecil/limpo*), ada yang menamakan dengan *imang* (*imam*) saja, sementara yang lain menamakan dengan *pangngulu* (*penghulu*).

Pada tingkat kampung terdapat jabatan-jabatan syara' seperti *guru* atau *imangkampung* (*imam kampung*) dan *pembantu-pembantunyayangterdiri dari katte* (*khatib*), *bilala/bidala* (*bilal*), dan *doja/doya*. Hingga kini, jabatan-jabatan syara' tersebut (kecuali *kali*) tetap ada dan tetap berfungsi di setiap kabupaten di Sulawesi Selatan, terutama di pedesaan.¹³⁾

Fungsi syara' pada garis besarnya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan kegiatan keagamaan umat Islam, baik menyangkut ibadah maupun sosial keagamaan. Sebagian besar kegiatan tersebut tidak ditangani langsung instansi Departemen

Agama, sehingga dengan demikian peran syara' sangat menunjang kesuksesan misi instansi ini.¹⁴⁾

Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang (lebih tiga abad atau hampir empat abad) dengan melintasi berbagai sistem pemerintahan yang mengaturnya, institusi syara' ternyata selalu mampu memperlihatkan vitalitas dan eksistensinya. Kemampuannya itu sangat ditentukan oleh sistem pendekatan yang menjadi ciri pelaksanaan kegiatan operasionalnya selama ini yakni pendekatan adaptasi kultural.¹⁵⁾

Dengan kenyataan itu maka dapat diasumsikan bahwa dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan beragama di daerah Sulawesi Selatan pada masa-masa mendatang, syara' akan tetap mampu memainkan peranan adaptifnya. Salah satu wujud perkembangan masyarakat dewasa ini yang telah dapat diakomodasi oleh sebagian aparat syara' ialah gerakan keluarga berencana.

Prospek Pemanfaatan Syara' dalam Gerakan KB

Pengikutsertaan syara' secara kelembagaan dalam program kegiatan gerakan KB, terutama di pedesaan Sulawesi Selatan, diduga akan sangat membantu kesuksesan pelaksanaan program gerakan KB itu sendiri, dengan alasan : persepsi dan pola pikir masyarakat penduduk asli Sulawesi Selatan pada umumnya masih cenderung di dominasi oleh pertimbangan-pertimbangan nilai budaya dan agama dalam menentukan pilihan untuk ikut berperan dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam kegiatan gerakan KB, syara' adalah institusi sosial keagamaan yang secara kelembagaan meru-

pakan lembaga tradisional yang justru menangani kegiatan masyarakat yang menyentuh langsung nilai agama dan budaya; syara' adalah institusi masyarakat yang relatif mapan dan memasyarakat, aparat syara', terutama yang memegang jabatan imam desa dan/atau imam kampung, tetap dijadikan panutan masyarakat dalam hal keagamaan.

Kemungkinan pemanfaatan syara' secara meluas dalam upaya menunjang kesuksesan pelaksanaan program gerakan KB di Sulawesi Selatan, didukung oleh kenyataan : aparat syara' sendiri pada dasarnya telah menerima program KB dan banyak di antaramereka yang mengizinkan dan bahkan menganjurkan isteri dan anggota keluarganya untuk menjadi asektor KB, banyak aparat syara' dengan inisiatif sendiri telah melakukan kegiatan "membantu" petugas KB (khusus dalam kegiatan pemberian motivasi) di saat-saat mereka melaksanakan tugas-tugas syara'.

Adapun wujud pemanfaatan syara' dalam gerakan KB, pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui semua bentuk kegiatan operasional di lapangan, yakni meliputi kegiatan-kegiatan: komunikasi, informasi, edukatif (KIE); pelayanan kontrasepsi (dengan memanfaatkan isteri, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang wanita); pelayanan integrasi dan pendidikan KB. Atau dengan menjadikan institusi syara' itu sendiri sebagai PPKBD (Pembinaan Pembantu Keluarga Berencana Desa) atau SUB PPKBD.

Hanya saja, ada beberapa hal (yang merupakan himbauan aspirasi para aparat syara') yang perlu diperhatikan apabila

mereka diharapkan berperan nyata : pertama, kejelasan status mereka di dalam pengorganisasian kegiatan KB; kedua, adanya/tersedianya fasilitas, termasuk jaminan sosial ekonomi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan peran serta mereka; ketiga, terbukanya peluang bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan kualitas pengelolaan kegiatan KB.

Untuk mengantisipasi secara tepat berbagai kemungkinan dan peluang yang dikemukakan di atas, terasa sekali perlunya dilakukan studi operasional dengan penekanan pada kegiatan bimbingan, pelatihan, dan uji coba di lapangan.

CATATAN

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988 (Solo: UDMayasari, 1988), hal. 74.
- 2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Laporan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1986-1987 (Ujung Pandang: Panitia/Tim Kerja Penyusunan Laporan Tahunan Program KB Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1986/1987, 1987), hal. 7- 13.
- 3) Drs. Zulkifli Gazali, Kepala BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan "Gambaran Umum Kebijakan dan strategi Gerakan KB Nasional Dalam Pelita V". Makalah yang disampaikan pada pertemuan dengan peneliti tanggal 6 Desember 1990 di Aula Kantor BKKBN Prop. Sulsel, Ujung Pandang.
- 4) E. Srihartati P. Pandi, "Kebijaksanaan, Strategi dan Prioritas Penelitian Pengembangan Pelita V Deputi Bidang Pengembangan Program BKKBN". Makalah yang disampaikan pada Konsultasi Bidang-Bidang BKKBN Pusat di Batu Malang tanggal 1-4 Nopember 1987, dalam buku : Makalah bidang Pengembangan Program Keluarga Berencana Nasional Pusat Pengelolaan Data dan Komputer Pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi (Jakarta : BKKBN Pusat, 1987) hal. 63.
- 5) Syachribunga, dkk., Peranan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dalam Alih Kelola KB di Sulawesi Selatan (Ujung Pandang : BKKBN Prop. Sulsel, 1987), hal.90.
- 6) Pat. Badrun, "Eksistensi Institusi Syara' di Sulawesi Selatan". Makalah yang disampaikan pada Seminar Studi Sosial Keagamaan di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Balai II Litbang Agama Ujung Pandang, tanggal 11 Maret 1991 di Ujung Pandang.
- 7) Abu Hamid, "Beberapa Aspek Kebudayaan yang Mendukung Pcles-tarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan," LONTARA, Ujung Pandang, No.21 Tahun XXI - 1986, hal. 57-67.
- 8) Teknik pemilihan lokasi dan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini didasarkan atas petunjuk dari deputi Bidang Pengembangan Program BKKBN dalam surat tanggal 17 Januari 1990 nomor 332/PD.101/F3/90.
- 9) Tokoh ulama yang diwawancarai secara mendalam, termasuk tujuh orang

mantan pimpinan tertinggi syara' masing-masing (1) KH. Daud Ismail di Soppeng(kini beliau menjabat Penghulu Syara' Kabupaten Soppeng, (2) KH. Hasyim di Palopo, (3) KH. M. Rafi' Sulaeman (almarhum) di Bone, (4) KH. Syayid Djamaluddin Puang Rammang di Ujung Pandang, (5) KH. Abdul Muin Yusuf di Rappang/Ujung Pandang, (6) KH. M. Shaleh Thaha di Ujung Pandang, dan (7) KH. Muhsin Thahir di Polewali Mamasa.

- 10) Teknik analisis yang diterapkan, didasarkan atas saran/petunjuk langsung dari DR. Peter Hagul, konsultan penelitian BKKBN Pusat, dalam pertemuan konsultasi dengan beliau pada tanggal 6 Juli 1990 di Kantor BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- 11) Mattulada, dkk., sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan (Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980), hal.36.
- 12) Mattulada, Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Jakarta : Universitas Indonesia, 1975), hal. 382.
- 13) Tugas-tugas dari masing-masing jabatan syara' tersebut yakni:
 - a) Imam bertugas membantu wali dalam wilayah kerjanya (pada masa pemerintahan kerajaan, wilayah kerja imam meliputi wilayah kerajaan kecil yang setingkat dengan desa/kampung sekarang), di samping tugas pokok imam.
 - b) Katte adalah pejabat syara' yang bertugas menjadi khatib (pembaca khotbah), baik khutbah Jumat maupun khutbah Hari Raya.
 - c) Bilala (Bugis/Makassar) atau bidala (Mandar) adalah pejabat syara' yang bertugas mengumandangkan adzan di mesjid pada waktu-waktu tertentu.
 - d) Doja/doya adalah pejabat syara' yang bertugas pengurus kebersihan dan perlengkapan mesjid.

Selain tugas-tugas tersebut di atas yang hanya berkisar pada pelaksanaan ibadah salat berjamaah di mesjid dan rangkaianannya, para pejabat syara' juga bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan yang ditradisikan masyarakat.
- 14) Penelitian ini telah menginventarisasikan sejumlah kegiatan keagamaan masyarakat di pedesaan Sulawesi Selatan yang menjadi tugas (aparatur) syara' menangani/melayaninya. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi :
 - (1) memimpin pelaksanaan salat berjamaah dan rangkaianannya.
 - (2) menjadi amil zakat di desa atau domisili masing-masing.
 - (3) Melaksanakan atau memimpin pelaksanaan akad nikah
 - (4) memberikan nasihat yang berhubungan dengan perkawinan, penyelesaian perceraian, dan urusan pembagian harta warisan.
 - (5) memimpin pelaksanaan upacara-upacara sosial keagamaan yang ditradisikan masyarakat setempat, seperti :
 - upacara akikah
 - upacara khitanan
 - upacara khatam mengaji (tamat mengaji Alquran)

- upacara syukuran atau selamatan keluarga
- upacara peringatan hari-hari besar Islam
- (6) memimpin penyelenggaraan pengurusan jenazah
- (7) melaksanakan pemotongan hewan ternak penduduk untuk sesuatu hajat.
- (8) memelihara dan memakmurkan rumah ibadah (mesjid)
- (9) menjadi da'i atau muballigh di desa atau domisili masing-masing.
- (10) mengkoordinir dan membimbing guru mengaji
- (11) mengarahkan kehidupan beragama masyarakat setempat.
- (12) menjadi pembantu Pegawai pencatat Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) di lingkungan desa atau domisili masing-masing.
- (13) membantu pemerintah (desa) setempat memelihara ketertiban, ketenangan, dan kerukunan umat beragama. Bandingkan tugas-tugas syara' di atas dengan tugas-tugas para kaum sebagaimana dinyatakan secara terinci di dalam Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1947 serta di dalam Pernyataan Bersama Kementerian Agama RI nomor 2 Tahun 1955 tanggal 23 Juni 1955 dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 50/3/20/KDN tanggal 24 Juni 1955.
- (14) Dimaksudkan dengan pendekatan kultural di sini ialah pendekatan metode dakwah yang diprangkan secara konsisten oleh pejabat syara' dalam proses oslamisasi di Su-

lawesi Setelah yang mengindahkan faktor kondisi lingkungan sosial yang dominan yakni struktural sosial dan konvensi yang berlaku dalam masyarakat. Struktural sosial dan kebiasaan masyarakat yang bersumber dari kepercayaan lama tidaklah ditantang atau diubah sekaligus melainkan dibiarkan hidup berdampingan secara damai dengan perilaku ilami yang dikembangkan syara'. Kemudian secara beransur dimasukkan hal-hal baru yang bercorak Islam menggantikan perilaku yang bersumber dari kepercayaan lama itu, hingga pada akhirnya perilaku Islami itu, hingga pada akhirnya perilaku Islam menjadi censi yang mewamai keseluruhan perlakuan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup (life cycle), jadi hanya terjadi dalam kegiatan sosial keagamaan bukan dalam kegiatan ibadah dan bukan pula menyangkut soal iman. Menurut Mattulada bahwa dari sudut kepercayaan di sini seolah-olah terjadi kepercayaan campur-aduk, tetapi dari segi metode dakwah, pendekatan kultural ini tepat sekali karena apa yang dicapai dalam adaptasi kultural yakni membangun emosi persekutuan yang dibangun dalam panggendereng membuat orang bugis (dan penduduk asli Sulawesi Selatan secara keseluruhan yang dengan Islam, pen.) merasakan secara keseluruhan yang menganut Islam (lihat Mattulada, 1975, of. cit., hal. 385).